

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki kemampuan sendiri untuk mengatur keuangan, di dalam perhitungan pendapatan setiap daerah mampu menentukan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan salah satu penerimaan pada setiap daerah yang akan mampu melaksanakan tujuan setiap daerah. Kegiatan ekonomi pada setiap daerah bervariasi dengan tujuan untuk mendorong setiap daerahnya berpotensi meningkatkan ekonominya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah tentunya akan melakukan upaya agar dapat meningkatkan penerimaan daerah sebesar-besarnya. Peran pemerintah daerah sangat besar untuk menentukan strategi bagaimana pendapatan daerah yang akan diperoleh dapat menunjang peningkatan ekonomi pada setiap daerahnya. Sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan pada setiap daerah akan berpengaruh pada pemasukan keuangan.

Adapun kewenangan daerah, yang dimaksud dengan kewenangan daerah yaitu seluruh yang mencakup pemerintah daerah tanpa terkecuali. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi proses kegiatan yang akan menghasilkan tujuan yang baik bagi perekonomian. Fungsi

pengawasan yaitu untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan untuk masa yang akan datang.

Pemerintah daerah akan menentukan target pendapatan dalam perhitungan minimal satu tahun anggaran. Target yang akan di peroleh dapat di pertanggung jawabkan penyusunannya dan memerlukan faktor-faktor yang tentunya akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat perekonomian daerah setempat. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan target pendapatan daerah dengan menggali sebaik-baiknya.

Pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan laba BUMD merupakan salah satu bentuk peran bantu masyarakat dalam mensejahterakan perekonomian daerah setempat. Retribusi daerah dan laba BUMD merupakan pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kebutuhan pemerintah.

Secara umum, untuk meningkatkan pendapatan daerah yang memerlukan faktor dari retribusi daerah, laba BUMD, DAU dan Jumlah Penduduk dalam hal tersebut ada beberapa metode sebagai berikut:

1. Memperluas daerah penerimaan

Tindakan ini akan memperbanyak penerimaan yang dapat di pungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi di anggap potensial dan strategis.

2. Memperkuat proses pungutan

Upaya memperkuat proses pungutan dapat dilakukan dengan cara mengubah tarif, khususnya tariff retribusi daerah dalam meningkatkan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Tindakan ini dapat di lakukan oleh pemerintah daerah dengan memeriksa dan mengawasi secara teratur dalam penerimaan pendapatan setiap proses yang dilaksanakan oleh daerah.

4. Meningkatkan kapasitas penerimaan

Dalam tindakan ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang lebih, khususnya dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang ada di daerah tersebut.

5. Meningkatkan efisiensi biaya pemungutan

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki prosedur secara efisien dalam pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Dari beberapa metode di atas, pemerintah daerah dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD khususnya retribusi daerah, laba BUMD dan DAU. Di Kota Magelang pada tahun 2010 mempunyai target dari APBD yaitu sebesar Rp. 398.625.847.000 kemudian terealisasi sebesar Rp. 401.911.336.532. Adanya realisasi APBD tersebut terbukti bahwa Kota Magelang memiliki potensi yang cukup baik. Kemudian persaingan

daerah juga akan menimbulkan inovasi dan kemajuan baru bagi perekonomian yang akan datang. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam penyelenggaraan rencana pada setiap daerah. PAD salah satunya potensi sumber pembiayaan pemerintah daerah yang di kelola secara optimal.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) Di Kota Magelang mengalami perkembangan yang cukup baik. Tahun 2011 sampai tahun 2015 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2011 hasil yang terealisasi sebesar Rp. 12.876.009,000 kemudian tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 16.399.601,000. Peningkatan pendapatan asli daerah lima tahun belakang ini dapat di manfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah Kota Magelang.

Perkembangan Kota Magelang dengan kondisi sebagai kota jasa yang hanya memiliki luas 18.12 km². Secara geografis Kota Magelang terletak pada posisi yang strategis, karena berada pada tepat di tengah-tengah pulau Jawa. Pada jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta-Purworejo selain itu Kota Magelang juga berada di tengah-tengah jalur wisata local dan regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan dataran tinggi dieng.

Letak strategis yang di miliki oleh Kota Magelang akan menunjang pendapatan asli daerah yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan Kota Magelang. Dengan letak yang strategis Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Kota Magelang merupakan daerah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terus menggali potensi-potensi keuangan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu adalah retribusi daerah, laba BUMD dan DAU. Dimana retribusi daerah memiliki pendapatan yang luas dan memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian laba BUMD juga tidak berbeda dengan retribusi daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar di lihat secara umum laba BUMD yang ada di kota Magelang juga cukup besar dalam penerimaan pendapatan daerah. Di Kota Magelang memiliki perusahaan daerah yang mampu memberikan pemasukan untuk meingkatkan pendapatan asli daerah. Ada salah faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang ada di Kota Magelang yaitu DAU. DAU yang akan memberikan masukan keuangan kepada pemerintah kota Magelang. Dimana DAU yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota Magelang tentunya akan memberikan dana untuk keperluan operasional yang ada di pemerintah kota Magelang.

Pada dasarnya pemerintah daerah kota Magelang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat khususnya kota Magelang agar lebih meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah kota Magelang mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penerimaan pendapatan daerah, dapat di identifikasi bahwa belum adanya kerjasama yang baik anatar masyarakat dengan pemerintah daerah kota Magelang.

Dalam hal ini, yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki perekonomian dan keuangan daerah serta dapat meningkatkan kemandirian daerah. Dengan demikian, diharapkan retribusi daerah, laba BUMD, DAU dan Jumlah Penduduk mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bedasarkan latar belakang di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah:
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MAGELANG”

1.2 Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, dimana Kota Magelang memiliki beberapa sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka peneliti hanya membahas pada faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Variabel-variabel yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang yaitu : Retribusi Daerah, Laba BUMD, DAU dan Jumlah Penduduk.
2. Data yang digunakan adalah data tahunan yaitu tahun 1984-2014 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Laba BUMD
 - d. DAU

e. Jumlah Penduduk

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang ?
2. Seberapa besar pengaruh Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang ?
3. Seberapa besar pengaruh DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang ?
4. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperdalam wawasan pengetahuan penulis tentang Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Jumlah Penduduk pada setiap daerah tertentu.
2. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas.
3. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).